

FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KEBIJAKAN RUSIA
ATAS PENJUALAN RUDAL ALMAZ ANTEI S-300
TERHADAP IRAN PASCA KESEPAKATAN NUKLIR

Syarifuddin Harfansyah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55138
Email : harvan629@gmail.com

Abstract

Russia is a country that began its identity when Cash became Tsar, the USSR and now the Russian Federation. The identity change raises issues of both political and economic governance that bring Russia more alarming condition. Russia's relations with Iran has existed for a long time. Cooperation Russian-Iranian nuclear program began in 1995 occurred when the existing agreements of the NPT (Non-Proliferation Treaty). In 2007 Russia made a sale agreement Almaz Antei S-300 to Iran and to experience delays until 2014. It became a polemic which is feared by the United States and Israel.

Keywords: Russian policy, Sales Almaz Antei S-300, Iranian Nuclear Program

Abstrak

Rusia merupakan negeri yang dimulai identitasnya pada saat Knyas kemudian menjadi Tsar, Uni Soviet dan sekarang Federasi Rusia. Perubahan identitas itu menimbulkan masalah dari pemerintahan baik politik maupun ekonomi yang membawa kondisi Rusia semakin memprihatinkan. Hubungan Rusia dengan Iran sudah terjalin sejak lama. Kerjasama program nuklir Rusia-Iran dimulai tahun 1995 terjadi saat sudah ada perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*). Tahun 2007 Rusia membuat kesepakatan penjualan Almaz Antei S-300 kepada Iran dan mengalami penangguhan hingga tahun 2014. Hal ini menjadi sebuah polemik yang sangat ditakutkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Kata kunci : kebijakan Rusia, Penjualan Almaz Antei S-300, Program Nuklir Iran

PENDAHULUAN

Rusia adalah sebuah negeri besar. Kelahiran Rusia sebagai pewaris garis politik Uni Soviet, dan beberapa republik Soviet lainnya sesungguhnya terjadi

beberapa bulan sebelum kematian Uni Soviet. Federasi Rusia lahir dari integrasi yang terjadi di Uni Soviet, di mana Uni Soviet adalah negara yang berideologi komunis telah memberikan pengaruh

terhadap perkembangan federasi Rusia. Namun, dengan berjalannya waktu federasi Rusia berusaha mengubah sistem pemerintahan yang otoriter menuju kearah yang lebih demokratis.

Identitas Rusia pada mulanya dipimpin oleh Knyas kemudian beralih menjadi Tsar. Pada masa inilah struktur pemerintahan Rusia mulai terbentuk. Pemerintahan Imperium Rusia Raya (Tsar) bersifat otokrasi, otoriter dan terpusat. Setelah masa Imperium Tsar runtuh kemudian digantikan dengan terbentuknya Uni Soviet (USSR) sebagai sebuah negara yang terbentuk dari ide dibangunnya masyarakat sosialis. Uni Soviet menempatkan ide komunisme dan Partai Komunis pada posisi yang sangat sentral. Akibatnya, sistem politik yang monopartai dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini membawa konsekuensi pada tumpang tindihnya urusan pemerintahan dan urusan partai.

Kemudian munculah berbagai masalah dari pemerintahan-pemerintahan

sebelumnya baik masalah politik maupun ekonomi, serta mengalami beberapa peristiwa yang kemudian membawa kondisi Rusia semakin memprihatinkan. Bangsa itu hanya mengetahui bahwa melalui demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan kehidupan akan lebih mudah tercapai tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggerakkan ekonomi dalam suasana demokratis.

Uni Soviet runtuh, menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. RSFSR (Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia) yang kemudian menjadi Federasi Rusia adalah kepingan terbesar bekas negara adikuasa tersebut, yang sekaligus memiliki hak sebagai pewaris kebesaran Uni Soviet. Namun demikian pecahnya Uni Soviet meninggalkan beberapa persoalan krusial yang harus segera diatasi demi keberlangsungan perikehidupan masyarakat dan peradaban bangsa Rusia.

Presiden pertama yang memimpin Federasi Rusia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin. Pada tahun 1999 Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk Vladimir Putin sebagai presiden Rusia selanjutnya.

Pasca hancurnya Uni Soviet, Rusia, Belarus dan Ukraina mempelopori dibentuknya CIS (*Commonwealth of Independent State/ Persemakmuran Negara Independen*) ditandai dengan penandatanganan Alma-Ata Protocol oleh 8 negara bekas Uni Soviet lain yaitu Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan dan Uzbekistan. CIS menjadi organisasi yang memiliki kekuatan koordinasi di bidang di bidang perdagangan, keuangan, hukum, dan keamanan. Selain juga sebagai kerjasama dalam pencegahan kriminalitas lintas batas negara. Perdagangan antara negara-negara CIS ini merupakan langkah membenahi perekonomian yang hancur pasca disintegrasi Uni Soviet.

Hubungan Rusia dengan Iran sudah terjalin sejak lama. Kerjasama program nuklir Rusia-Iran terjadi saat sudah ada perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) dan ada penentangan dari negara-negara lain. Pada tahun 1990 sebelum Perang Dingin usai, Uni Soviet memulai dialog dengan Iran mengenai kemungkinan penyelesaian proses pembangunan reaktor Bushehr yang belum selesai sekaligus memasok kebutuhan peralatan lainnya terkait reaktor tersebut. Proses dialog tersebut dilanjutkan kembali setelah Perang Dingin selesai pada Januari 1995, dimana Federasi Russia secara resmi menyatakan akan membantu Iran menyelesaikan proses pembangunan reaktor Bushehr, dan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Iran mengenai kemungkinan pembangunan tiga reaktor serupa di lokasi yang sama. Semenjak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama tersebut, Amerika Serikat secara berkelanjutan mulai memperlihatkan penolakan keras terhadap keberadaan

reaktor Bushehr yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Iran sebagai fasilitas pengembangan senjata pemusnah massal.

Amerika Serikat khawatir bahwa rezim yang berkuasa melalui Revolusi Islam akan membawa instabilitas di wilayah Timur Tengah dan mengancam kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, utamanya adalah yang berkaitan dengan sumber daya alam energi gas dan minyak, serta keberadaan Israel. Amerika Serikat juga beranggapan bahwa meskipun upaya-upaya lobi internasional berhasil membatalkan sejumlah kerjasama antara Iran dengan negara-negara pensuplai kebutuhan program nuklirnya, Iran masih memiliki kemungkinan untuk menjalankan sebuah program nuklir klandestin bertujuan militer. Program nuklir Iran menjadi masalah yang diperdebatkan dalam politik internasional kontemporer oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan Eropa. Pengembangan nuklir di Iran mendapat protes keras dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Keputusan Rusia untuk [menjual sistem pertahanan udara mutakhir](#) yakni Almaz-

Antei S-300 PMU-1 kepada Iran menimbulkan berbagai kekhawatiran dari Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kehadiran sistem pertahanan udara itu dapat mengubah pendekatan dan sikap politik kedua negara dalam memandang Iran. Selama bertahun-tahun Pemerintah AS telah berusaha melobi Pemerintah Rusia untuk mencegah penjualan sistem pertahanan udaranya kepada Iran. Kesepakatan penjualan S-300 semula telah disetujui oleh Rusia dan Iran pada 2007. Tekanan dari AS dan Israel memaksa Rusia menanggukkan penjualan S-300 pada 2010 dan mencapai kesepakatan hingga tahun 2014.

RUMUSAN MASALAH

Mengapa Rusia menjual rudal Almaz Antei S-300 terhadap Iran pasca kesepakatan nuklir?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep dan teori yang digunakan adalah teori politik luar negeri dan teori kepentingan nasional. Dalam mempelajari

politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri menurut Richard Snyder pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang

menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan.

Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton di definisikan sebagai berikut : “*the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalize conception of these element that constitute to the state most vital needs. These include self preservation, independent, territorial integrity, military security, and economic well being.*”

Self preservation diartikan Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai hak suatu Negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. *Independen* diartikan sebagai

kemerdekaan atau kebebasan suatu Negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan tidak terikat atau terjajah oleh Negara lain. *Territorial integrity* dapat diartikan sebagai suatu integritas wilayah. Keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu Negara. *Military security* atau keamanan militer, dimana hal tersebut menjadi penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu Negara. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan bahwa Negara yang memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat maka Negara tersebut akan lebih memiliki *Beginning position dan Power* yang besar dimana dapat mempengaruhi posisinya dalam hubungan antar Negara. *Economic well-being* diartikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimana kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar penyokong kesetabilan suatu Negara. Yang mana Kesetabilan ekonomi merupakan suatu faktor

terpenting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta – fakta yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku – buku, jurnal – jurnal, surat kabar, website dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Dengan tehnik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data–data atau bahan–bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang di peroleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan – bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan di teliti dan dapat di uji kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat waktu dimulainya program nuklir Iran tahun 1995 yang disponsori oleh Rusia selama 10 tahun yaitu tahun 2005 dan saat terjadi kesepakatan

penjualan Almaz-Antei S-300 milik Rusia kepada Iran tahun 2007 dan mengalami penangguhan oleh Amerika Serikat dan Israel hingga mencapai kesepakatan final tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEPENTINGAN NASIONAL *SELF PREERVATION* RUSIA ATAS PENJUALAN S-300

Pemahaman akan Rusia tidak terlepas dari sejarah masa lalunya. Perubahan corak pemerintahan dari otokrasi ke demokrasi sangat sulit bagi Rusia, dan pengalaman demokrasi belum pernah diterapkan dalam pemerintahan Rusia sebelumnya. Rusia berusaha mengubah system pemerintahan kearah yang lebih demokratis yang ditandai dengan proses pemilu untuk pertama kali yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat Rusia pada pemilihan presiden Boris Yeltsin untuk masa jabatan tahun 1991-1999. Kemudian berlanjut pada masa kepemimpinan Vladimir Putin 2000-2004 dan pada periode ke dua 2004-2008 yang

mengupayakan perkembangan demokrasi di Rusia.

Uni Soviet hingga berakhirnya Perang Dingin menjadi salah satu negara “*superpower*” disamping Amerika Serikat. Selain itu, juga Rusia sebagai satu-satunya negara yang menjadi pesaing baik dalam perluasan ideologi maupun perkembangan teknologi persenjataan pada saat itu. Industri persenjataan Rusia sudah tidak diragukan lagi dalam dunia internasional. Karena Rusia mewarisi kekuatan militer dari Uni Soviet. Meskipun Rusia bukan satu negara adikuasa seperti Uni Soviet dulu, namun kekuatan dan potensinya cukup besar dan tak boleh diabaikan dan nampak usahanya untuk kembali menjadi kekuatan utama dunia.

Rusia yang secara letak geografis dekat dengan Asia khususnya Asia Tengah dan Timur Tengah tentunya menjadi tantangan tersendiri. Dan membuat Rusia secara tidak langsung memiliki kepentingan dengan negara-negara tersebut. Rusia harus menjaga dan mempertahankan

hubungan baiknya dengan Negara-negara Asia demi eksistensi negaranya. Karena letak wilayahnya yang berdekatan, Rusia memanfaatkan menjadi jembatan antara AS dan Iran dengan menjadi *middle-man* yang memiliki ruang gerak fleksibel diantara keduanya.

Rusia memiliki hubungan yang baik dengan Iran dan aktor-aktor Internasional yang curiga dan prihatin tentang rencana pengembangan nuklir Iran. Sehingga, posisi Rusia belum mencapai tingkat mediator, hal ini dikarenakan Rusia masih memiliki kepentingan dan tujuan tertentu dari posisi yang berada diantara AS dan Iran tersebut. Rusia diperuntungkan dengan hubungan baiknya dengan negara lain, Rusia dapat menjadi negara yang dipandang yang merupakan negara *superpower*. Dengan salah satu cara inilah Rusia dapat mengembangkan system pemerintahan yang digunakan yaitu dengan membangun hubungan yang baik dan menguntungkan dengan negara lain.

KEPENTINGAN *ECONOMIC WELL-BEING* ANTARA RUSIA-IRAN

Bantuan yang diberikan Rusia terhadap Iran pada tahun 1995, kontrak yang dibuat merupakan perjanjian yang berisi nantinya Rusia akan mendampingi serta membantu Iran untuk mengembangkan reaktor nuklirnya. Pada tahun 1995 Rusia *Ministry of Atomic Energy*, Viktor Mikhailove dan *Head of Atomic Energy Agency of Iran*, Riza Arollahi menandatangani perjanjian sebesar \$800 milyar untuk bantuan mengembangkan reaktor nuklir di Iran. Perjanjian yang disepakati selama 10 tahun tersebut sejak tahun 1995, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal hingga tahun 2009 pun belum ada tanda stasiun tersebut akan sempurna dan dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan banyaknya desakan dari luar untuk menghentikan Rusia sehingga banyak proyek yang tertunda.

Rusia memiliki dilema tersendiri dalam kebijakannya untuk membantu Iran

dalam proses pengembangan nuklir. Tekanan-tekanan dari negara barat membuat hal ini menjadi masalah karena banyaknya tekanan terhadap Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya. Menurut keputusan Dewan Keamanan PBB pasca VII tahun 2006, Iran harus menunda pengembangan nuklir untuk diselidiki lebih lanjut oleh IAEA. Disisi lain Rusia tidak melihat rencana pengembangan nuklir Iran sebagai suatu ancaman, dan Rusia tidak ingin menghancurkan hubungan jangka panjangnya yang telah terjalin dengan Iran.

Salah satu pertimbangan yang mendasari Rusia untuk mempertahankan hubungannya dengan Iran adalah soal ekonomi. Iran memiliki persoalan sumber energi seperti minyak dan gas. Segala bentuk hubungan dan kerjasama yang dilakukan antar kedua Negara didasari pada keuntungan yang didapat masing-masing Negara atas "barter" minyak mentah dan gas dari Iran kepada Rusia dan

bantuan program nuklir Iran serta senjata dari Rusia kepada Iran. Tidak dapat dipungkiri Rusia juga memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Timur Tengah terkait dengan industri persenjataan. Iran merupakan pasar terbesar Rusia setelah China dan India.

Krisis internasional yang awalnya merupakan krisis akibat ketidakstabilan politik di Ukraina tahun 2013, kini telah berkembang khususnya menjadi krisis Rusia, terutama setelah Rusia mengirim pasukan militernya ke Ukraina, khususnya Semenanjung Krimea. Reaksi masyarakat internasional pun bermunculan atas tindakan Rusia tersebut. Tindakan Rusia ini mendapat reaksi keras dari pemerintah ad interim Ukraina dan negara-negara Barat yang tergabung dalam UE dan AS. AS dan UE bereaksi terhadap tindakan Rusia dengan mengeluarkan sanksi berupa travel ban bagi beberapa pejabat Rusia yang dianggap terkait dengan pengambilan keputusan Moskow, membekukan aset-aset pengusaha Rusia di negara-negara

tersebut, dan mengambil berbagai langkah nonmilitar lainnya. Dampak terberat sanksi dirasakan oleh perekonomian Rusia. Sanksi keuangan dan kemunduran iklim investasi menyebabkan aliran modal keluar dan ekonomi Rusia melemah.

Uni Eropa telah mengumumkan daftar sanksi baru bagi Rusia, salah satunya pembekuan seluruh aset dan rekening badan usaha Krimea di Eropa. Namun, menurut para ahli, sanksi sektoral yang akan memberi dampak paling besar. Sanksi itu membuat bank-bank pemerintah Rusia tidak bisa mendapatkan kredit dari Eropa dan perusahaan migas Rusia akan kehilangan akses teknologi produksi minyak di lepas pantai Laut Arktik.

Sanksi terbaru Eropa untuk Rusia diumumkan dalam dua tahap. Sanksi tahap pertama berupa pembekuan aset individu dan badan usaha Rusia. Sanksi tahap kedua berupa sanksi sektoral bagi perusahaan-perusahaan Rusia. Para investor Eropa dilarang menjalankan operasi langsung dan tidak langsung dalam

perdagangan saham dan instrumen utang bank-bank besar pemerintah Rusia seperti Sberbank, Rosselskhozbank, VTB (Vneshtorgbank), Gazprombank, dan VEB (Vnesheconombank). Selain itu, perusahaan Eropa juga dilarang memberi akses teknologi produksi minyak laut dalam untuk Rusia, termasuk penjualan instrumen pemboran dan menara bor (*derrick*) portabel, pompa minyak, dan *rig* mengapung untuk pemboran laut dalam (*semisubmersible rig, drillship*). Para pengamat ahli menyatakan sulit untuk menilai tingkat kerugian yang dialami perekonomian Rusia akibat sanksi-sanksi baru tersebut.

Rusia mengatakan bahwa transfer alat yang selama ini dilakukan bukan merupakan barang yang sensitif hal ini dikarenakan AS dan Rusia memiliki definisi yang berbeda mengenai barang tersebut, Rusia lebih fokus terhadap materi-materi kecil yang memang dapat dikembangkan menjadi senjata nuklir namun dalam kacamata AS materi sensitif

merupakan segala macam hal tidak hanya materi kecil seperti pada pandangan Rusia. Walaupun disisi lain beberapa ilmuwan Rusia sudah ada yang mulai mengkhawatirkan pengembangan nuklir Iran yang sudah berada dalam kapasitas pengembangan senjata.

Rusia tetap berusaha melakukan diplomasi dan berunding dengan Iran agar Iran kembali kepada NPT, dan juga tetap mau bekerjasama dengan baik dengan IAEA. Februari 2011, Rusia kembali menolak resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, pada bulan Juli Rusia mengaplikasikan *step-by-step* hubungan dengan Iran, dengan cara ini Rusia akan bertindak lebih lunak dan tetap bekerja sama dengan P5+1, hal ini dilakukan agar Iran kembali bekerjasama dengan IAEA.

Perjanjian yang dibuat pada awalnya oleh Rusia dan Iran sendiri dapat dikatakan jauh dari rencana awal, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bila dilihat dari jangka waktu

saat Rusia harus dapat memenuhi kewajibannya terhadap Iran. Rusia pun terkesan labil dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan, hal ini tentu terjadi karena sebagai aktor tengah (penghubung negara luar dengan Iran) Rusia harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Namun dilihat dari kaca mata profesional tidak sepatasnya Rusia sering membatalkan kesepakatan awal secara sepihak, walaupun terlihat jelas bahwa hubungan jual-beli antara Rusia dan Iran yang tadinya dapat dikatakan sekedar kerjasama ekonomi jual beli alat, namun yang membedakan disini adalah alat yang di perjual belikan merupakan alat-alat yang berkaitan dengan nuklir dan akhirnya menarik kepentingan negara-negara dan aktor lainnya untuk masuk kedalam lingkaran antara Rusia dan Iran.

Dalam hal ini pula tentu Rusia tidak bodoh untuk menempatkan diri, tentu Rusia sendiri telah memperhitungkan untung dan rugi serta akibat dari kebijakan

yang dikeluarkan apa lagi saat pertama setuju untuk membantu Iran dalam pengembangan tenaga nuklir. Pada akhirnya posisi Rusia pun membantu negara barat karena Rusia dan perjanjian bantuan pembangunan reaktor nuklir tersebut merupakan sebuah pintu gerbang untuk masuk ke dalam Iran dan memperoleh informasi yang akurat. Sejauh ini pun hubungan antara Rusia dan Iran walaupun mengalami pasang –surut pada akhirnya tidak membatalkan perjanjian yang telah terjadi diantara keduanya mengenai bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan disatu sisi perjanjian ini merupakan *win-win solution* diantara Rusia dan Iran, Iran yang membutuhkan Rusia untuk membantu mereka dalam pembangunan reaktor nuklir dikarenakan keterbatasan yang Iran miliki dan disisi lain Rusia juga membutuhkan Iran untuk mengisi kas negaranya.

Perjanjian ini pun memberikan dua keuntungan bagi Rusia, secara finansial kontrak dengan Iran tersebut jelas tidak

berharga murah dan disisi lain Rusia berhasil menempati posisi yang strategis yang kembali mendapatkan perhatian dengan langkah besar yang dilakukannya tersebut. Perjanjian yang bila diukur dari segi waktu sudah gagal karena melewati batas waktu penyelesaian yang disepakati di awal perjanjian, namun pada akhirnya perjanjian yang terus diulur-ulur akhirnya menemukan titik puncaknya yaitu pada peresmian reactor pertama yang diremikan Iran pada tahun 2011 di Bushehr.

Penjualan S-300 memiliki keuntungan dalam segi ekonomi bagi Rusia. Selain menjaga hubungan dan kerjasama dengan Iran yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah, S-300 merupakan senjata rudal dengan kontrak yang tidak berharga murah yang akan menarik kepentingan negara-negara lain dalam lingkaran hubungan antara Rusia-Iran.

KESIMPULAN

Kepentingan nasional Rusia dalam mempertahankan jati diri dan membangun

eksistensinya di tangan perkembangan global mengalami dinamika yang naik turun sehingga mempengaruhi hubungan negara tersebut. Rusia disini memiliki posisi yang sangat strategis, pertama posisinya menjadi penghubung Iran dengan negara barat karena perilaku Iran yang sangat tidak bersahabat dengan negara barat lainnya dengan kata lain Rusia disini menjadi *Middle-man*. Disisi lain hubungan baik Rusia dan Iran yang terus dijaga berbuah keuntungan dari perjanjian pengembangan tenaga nuklir yang dilakukan Rusia. Hal inilah yang membuat Rusia kembali menjadi perhatian setelah Perang Dingin dan lahan ini pula yang digunakan Rusia sebagai salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian mereka pasca runtuhnya Soviet.

Rusia juga telah bangkit dari keterpurukan ekonominya untuk menuju perekonomian yang lebih baik. Kepentingan Rusia inilah yang membuat Rusia terus menjaga hubungan baik dengan Iran ataupun Negara barat.

Berbagai cara dilakukan Rusia untuk memulihkan negaranya dari krisis ekonomi akibat sanksi barat, salah satunya dengan penjualan rudal S-300. Selain itu Rusia juga terus menjaga hubungannya dengan Timur Tengah, dalam hal ini Iran agar terus menjalin kerjasama dalam sector perdagangan dan jual beli atau "barter" minyak dan senjata.

Tekanan yang datang dari luar baik dari AS, PBB, serta IAEA juga semakin

DAFTAR RUJUKAN

Alexei G. Arbatov.1993. *Russia's Foreign Policy Alternatives*, Autumn: *International Security*

Alexei K. Pushkov. 1993. Letter from Eurasia: Russia and America: The Honeymoon's Over,*Foreign Policy* No. 93

Alfian, 1989. *Pembaharuan Gorbachev: Makna Ideologis dan Dampaknya di Uni Soviet dan Eropa Timur*

Andrew Koch and Jeanette Wolf.1998. *Iran's Nuclear Facility : The Profile*. Washington: Center for Non Proliferation Studies

Anton Khlopkov dan Anna Lutkova.2010. *The Bushehr NPP: Why did It Take So Long?*. Moskow:Center for Energy and Security Studies

Coulombis,T.A.,&wolfe,J.H (1990). *Pengantar hubungan internasional:Keadilan dan Power*.

membuat Rusia harus berhati-hati dengan segala kebijakan yang mereka keluarkan. Namun bila melihat dari pola hubungan Rusia dan AS kedua negara tersebut saling menggunakan posisi satu sama lain terkait dengan isu nuklir Iran tersebut. AS menggunakan Rusia untuk masuk ke Tehran, begitu juga Rusia menggunakan AS untuk tetap eksis didunia internasional dan juga sebagai bentuk hubungan baik dengan negara barat.

(M.Marbun,Trans.)
Bandung:Abardin.

Dmitry Trenin.2008. "Russia's Coercive Diplomacy", *Carnegie Moscow Center Briefing Vol. 10 Issue 1*

Dr. Emmanuele Ottolenghi. 2009. *Russia and Iran's Nuclear Program*, London : Profilebooks

D. Fischer, "The Non-Proliferation Treaty: Review and Extension", (1995), dalam J. Brown (Ed.) *Old issues and new strategies in arms control and verification*. Amsterdam: VU University Press

Fahrurodji,A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar –belakang Budayanya*; Pengantar: Rachmat Witoelar; edisi: 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Frankel, Joseph 1988, *International Relations in a Changing World*

- Fourth Edition*, Oxford University Press, New York
- Hoffmann, Katharina. *Eurasian Union, a New Name for an Old Integration Idea*, Russian Analytical Digest,
- Holsti, K. J. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*, 6th, Prentice Hall, Inc, New Jersey
- Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982,
- James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press,
- James N. Rosenau. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press
- John W. Parker. 2012. *Russia and the Iranian Nuclear Program : Reply or Breakthrough?*. Washington : National defense University Press
- Krass, A. S. 1997. *The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership*. Westport, CT: Praeger
- Miriam Budiardjo. 1983. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Mizin, Victor. 2004. — *The Russia- Iran Nuclear Connection and U.S Policy Option*. Moscow : IMEO Institute
- Richard Sakwa. 2008. *Russian Politics and Society* (4th ed.), London: Routledge
- Robert H. Donaldson & Joseph L. Noyes. 1998. *The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests*, New York: M. E. Sharpe
- Theda Skocpol. 1977. *Tentang konsep Imperial State sebagai suatu tipe negara, baca: Frances V. Moulder, Japan, China, and Modern World Economy*. Cambridge University Press
- Varma. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wicaksana, I Gede Wahyu, 2015. *MBP Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tengah SOH321 : Understanding Russia II : Russia's Foreign Policy*. Universitas Airlangga, FISIP Universitas Airlangga